

ABSTRAK

Akuntansi Pertanggungjawaban merupakan suatu sistem akuntansi yang mengakui adanya berbagai pusat pertanggungjawaban pada keseluruhan organisasi dan mencerminkan rencana dan tindakan setiap pusat itu dengan menetapkan penghasilan dan biaya tertentu bagi pusat yang memiliki tanggungjawab yang bersangkutan. Diharapkan dengan adanya sistem akuntansi pertanggungjawaban akan dihasilkan informasi akuntansi yang relevan bagi manajemen perusahaan sebagai alat untuk pengendalian biaya dan penilaian kinerja manajer pusat pertanggungjawaban. Tanggung jawab atas pengendalian biaya harus diserahkan kepada manajer pusat pertanggungjawaban yang bertanggungjawab terhadap penganggaran biaya dan realisasinya. Sedangkan penilaian kinerja diukur dengan membandingkan antara biaya aktual dengan biaya yang dianggarkan, yang dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban. Dimana biaya yang dimaksud disini adalah biaya yang secara langsung dapat dikendalikan oleh manajer pusat pertanggungjawaban tersebut. Agar akuntansi pertanggungjawaban dapat dilaksanakan dengan baik, maka ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu adanya struktur organisasi yang terdesentralisasi yang secara tegas dan jelas mengatur wewenang dan tanggung jawab setiap bagian, adanya sistem anggaran yang disusun untuk setiap tingkatan manajemen, klasifikasi biaya berdasarkan terkendali atau tidak terkendalinya biaya oleh manajer pusat pertanggungjawaban, sistem akuntansi yang disesuaikan dengan bentuk organisasi dan adanya laporan pertanggungjawaban kepada manajer yang bertanggung jawab.

Pada perusahaan konstruksi PT."X" di Surabaya, telah menerapkan sistem akuntansi pertanggungjawaban namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan persyaratan yang dikehendaki dalam akuntansi pertanggungjawaban. Hal ini tampak pada pengklasifikasian biaya yang belum diklasifikasikan secara jelas berdasarkan terkendali atau tidak terkendalinya biaya oleh bagian pelaksana proyek sebagai pusat pertanggungjawaban biaya. PT. "X" juga belum menetapkan kode akun yang menunjukkan kode pusat pertanggungjawaban, sehingga akan sulit untuk menentukan pusat pertanggungjawaban dimana biaya tersebut terjadi. Laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pelaksana proyek hanya memuat informasi kuantitatif yang menunjukkan laporan tentang anggaran biaya dan realisasinya serta selisih antara anggaran biaya dan realisasinya. Sedangkan analisa yang menunjukkan terjadinya selisih tersebut belum dicantumkan dalam laporan pertanggungjawaban tersebut.

Agar sistem akuntansi pertanggungjawaban yang diterapkan pada PT."X" dapat digunakan sebagai alat pengendalian dan penilaian kinerja pelaksana proyek, maka sebaiknya laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh pelaksana proyek harus menunjukkan analisa yang menjelaskan selisih yang terjadi antara anggaran dan realisasi biaya serta harus dilakukan juga pemisahan biaya antara biaya terkendali dengan biaya tidak terkendali. Dalam membuat klasifikasi dan kode akun, sebaiknya dilakukan perluasan yang menunjukkan kode pusat pertanggungjawaban biaya maupun detail biaya berdasarkan terkendali atau tidak terkendalinya biaya oleh pusat pertanggungjawaban tersebut.